

HAKIM TOLAK KEMBALIKAN ASET DAN BUKA REKENING

Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara

JAKARTA (KR) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukuman delapan tahun penjara. Majelis hakim juga menghukum denda Rp 500 juta subsidier empat bulan pidana kurungan pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas Enembe oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," kata Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan di Pengadilan

Tipikor Jakarta, Kamis (19/10).

Dalam putusan, Lukas Enembe juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 19.690.793.900 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," ungkap Rianto.

Putusan majelis hakim juga memvonis terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun

sejak dia selesai menjalani pidana pokoknya. "Menyatakan terdakwa Lukas Enembe tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua penuntut umum," jelas Rianto.

Majelis hakim juga menolak permohonan Lukas Enembe terkait pembukaan rekening serta pengembalian aset miliknya. Mengingat rekening dan aset tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, yakni terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Fu)-f

ANGGOTA DPR/MPR RI DRS HM IDHAM SAMAWI Membangun dengan Laksanakan Sila-sila Pancasila



KR-Juvintarto

Anggota DPR/MPR RI Drs HM Idham Samawi menandatangani prasasti peresmian Pendapa IKS Piyungan.

BANTUL (KR) - Melaksanakan sila-sila Pancasila di tingkat kalurahan terbukti mampu mengangkat prestasi dan kesejahteraan warga. Seperti dilakukan Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Lurah Srimulyo Drs Wajiran mampu mengangkat prestasi Kalurahan Srimulyo di tingkat nasional dengan meng-

"Dari tingkat kalurahan hingga nasional, Pancasila terbukti mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri ribuan suku dan pulau, 700-an bahasa, beragam agama, hingga NKRI eksis di usia 78 tahun," tegas Anggota DPR/MPR RI Drs HM Idham Samawi dalam Sosialisasi Akbar Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan, Kamis (19/10) di Pendapa Ibu Kota Srimulyo

(IKS) Piyungan, Bantul. Idham menyebutkan, pengamalan nilai-nilai Pancasila di Kalurahan Srimulyo terlihat dari kehidupan beragama yang bagus, pembangunan pendapa dan masjid di lokasi baru IKS, disusul kantor kalurahan yang mendapat dukungan dari seluruh warga termasuk donasi dan kerja sama dari luar, seperti

dengan Universitas Janabardra (UJB) dan meraih banyak prestasi "Prestasi terakhir menjadi wakil DIY sebagai Kalurahan dengan Keterbukaan Informasi Publik," ucap Idham yang pada kesempatan itu juga menandatangani prasasti peresmian Pendapa IKS bersama Rektor UJB Dr Risdianto ST MT. (Vin)-f

Dokumen

setelah tahapan verifikasi. "Ketentuan penerimaan pendaftaran bakal paslon capres-cawapres adalah lengkap atau tidak lengkap," jelas Idham.

Setelah dinyatakan lengkap, dilanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi administrasi.

Pada pendaftaran kemarin, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat kesempatan pertama. Sebelum menuju KPU pasangan ini berkumpul di Kantor DPP NasDem bersama koalisi parpolnya yakni NasDem, PKS dan PKB serta para relawan dan pendukung paslon tersebut. Setelah itu, mereka bergerak beriringan diantar ribuan massa dan tiba di Kantor KPU sekitar pukul 09.30 WIB.

KPU dijadwalkan pasangan Amin mendaftar pada pukul 08.00 WIB, tetapi lautan manusia yang memadati Jalan Imam Bonjol menyulitkan Anies-Muhaimin beserta rombongan petinggi partai Koalisi Perubahan masuk ke Kantor KPU RI.

Rombongan Anies-Muhaimin baru masuk ke dalam Kantor KPU RI sekitar pukul 09.45 WIB.

Kemudian, Anies-Muhaimin secara

simbolis menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari di ruangan utama Kantor KPU RI. Dari dalam ruangan itu terdengar teriakan "Amin" yang cukup keras hingga terdengar dari luar ruangan.

Anies-Muhaimin memasuki ruang pendaftaran dengan didampingi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhuddin dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Anies-Muhaimin menjadi bakal pasangan capres dan cawapres yang pertama kali mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024, Kamis.

Ganjar-Mahfud

Sebelum menuju KPU, capres Ganjar Pranowo mengawali datang di Tugu Proklamasi Jakarta sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyapa para pendukung dan menyampaikan orasi. Ganjar disambut tabuhan gendang yang dimainkan belasan pelaku budaya serta sapaan antusias para relawan yang sudah menunggu sejak pagi.

Para pendukung yang memakai kaos bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengibarkan bendera Merah Putih seraya meneriakkan 'Ganjar presiden!'

Sumbangan hal 1

Sebelumnya, cawapres Mahfud MD telah tiba terlebih dahulu di Tugu Proklamasi. Pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo ini, mendaftar ke KPU pada pukul 11.00 WIB.

Pasangan Ganjar-Mahfud yang diikuti para pendukungnya memadati jalan menuju Gedung KPU. Keduanya, menggunakan mobil dinas RI-1 yang digunakan Presiden pertama RI Soekarno.

Eks mobil dinas RI-1 berjenis Cadillac Fleetwood 75 Limousine berwarna hitam itu sudah terparkir di Tugu Proklamasi, yang menjadi lokasi awal iring-iringan prosesi Ganjar-Mahfud ke Kantor KPU di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Ganjar-Mahfud sampai di KPU pukul 11.00 WIB.

Prosesi pendaftaran pasangan Ganjar-Mahfud yang didampingi Ketum PDIP Megawati, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketum Perindo Hary Tanoe. Selain itu, juga ada sederet petinggi parpol pendukung lainnya, seperti Puan Maharani, Tuang Guru Bajang, Hasto Kristiyanto dan lain-lain. (Ant/Obi)-d

Sumbangan hal 1

pendaftaran dari 19 hingga 25 Oktober 2023.

"Kami ingin memaksimalkan benar kekeluasaan waktu ini untuk melakukan analisa dan pendalaman yang sangat serius. Jadi wapres begitu keluar benar-benar ada efek surprise, 'Oh ini tokoh yang akan membantu elektabilitasnya Pak Prabowo'," ujarnya. (Ant)-f

Sumbangan hal 1

umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Dari keputusan tersebut, seseorang bisa melompat karir politiknya dari anggota DPRD atau Bupati/Walikota menjadi calon presiden/wakil presiden. Persyaratan menjadi calon presiden/wakil presiden bukan semata umur, namun juga kompetensi. Antara umur dan kompetensi ini biasanya sejalan, dalam arti bahwa bagi politisi karir, semakin banyak umurnya, semakin banyak pengalaman politiknya, akan semakin meningkat kompetensinya dan kematangannya dalam berpolitik.

Dengan adanya Putusan MK tersebut, memberi peluang bagi politisi karbitan dan memperkuat politik dinasti. Politisi 'anyaran' yang belum banyak makan asam garam bisa menjadi pemimpin negeri ini karena popularitas dan nama besar keluarga dan dukungan partai politik. Sejahter ini, partai politik juga terjebak dalam rekrutmen politik dan memproduksi politisi karbitan. Contoh paling nyata adalah munculnya Kaesang sebagai ketua partai. Upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, putusan MK dan rendahnya pelembagaan partai politik saling berkelindan dalam mendukung politik dinasti.

(Penulis adalah Dosen Program Doktor Ilmu Pemerintahan UMY, menulis disertasi soal politik dinasti)-f

KIM

diri sebagai peserta Pilpres 2024.

"Justru bagus. Situasi saat ini pun sudah memberikan angin segar ke Pak Prabowo. Anda bayangkan, ada dua pasangan capres daftar hari ini (kemarin), yang ditanyakan rakyat, 'Eh, kapan Pak Prabowo mendaftar? Pasangannya siapa? Curious (penasaran), kepo dan bersemangat

sekali lho menanti calonnya Pak Prabowo ini," ujarnya.

Pihaknya juga tak tergesa-gesa mengumumkan bakal cawapres dan mendaftarkan diri sebagai kontestan pilpres, karena memiliki banyak kandidat bacawapres melimpah untuk disandingkan dengan Prabowo. Selain itu, KPU telah mengalokasikan waktu

Politik

kekuasaan dengan memajukan keluarganya dalam kontestasi politik. Sehingga dalam keluarga mempunyai dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik. Kesamaan profesi di antara anggota keluarga memang sesuatu hal yang wajar karena proses sosialisasi maupun legasi nilai-nilai dan ketrampilan politiknya. Namun ada dua hal yang perlu dicermati dalam melihat praktik politik dinasti yaitu apakah yang bersangkutan mempunyai kapasitas dan apakah sesuai dengan prosedur. Apabila memenuhi dua kriteria tersebut, maka bukan termasuk politik dinasti meski berasal dari keluarga politik. Biasanya, mereka juga berkarir dari bawah dan bukan politisi karbitan yang muncul secara tiba-tiba tanpa pengalaman politik sebelumnya.

Meskipun demikian, posisi politik yang berbeda yang berasal dari satu keluarga sangat rawan terjadi konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan inilah yang seringkali membuat politik dinasti menjadi sumber korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Mencermati keputusan MK, maka tidak mengherankan kalau kemudian dianggap sebagai upaya untuk memperbesar dinasti politik Jokowi. Dalam legal standingnya, pengusul jelas menyebut sebagai pengagum Gibran dan langkah

yudisial review supaya Gibran mempunyai peluang dalam kontestasi pilpres. Ketua MK sebagai paman Gibran yang semestinya *declare* tidak turut serta dalam pengambilan keputusan karena konflik kepentingan, justru menjadi penentu dan jalan bagi Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apalagi sebelumnya jelas ada lamaran ke Gibran untuk menjadi cawapres, namun terkendala syarat usia. Tidak mengherankan kalau kemudian MK diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga.

Tuduhan Jokowi membangun dinasti politik mulai muncul setelah merestui Bobby dan Gibran menjadi Walikota Medan dan Solo. Sekali lagi, meski tuduhan membangun politik dinasti selalu ditepis, namun tidak bisa menutup mata publik. Upaya untuk membangun politik dinasti ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari partai politik.

Keputusan MK memperkuat tuduhan kepada Jokowi dalam membangun dinasti politiknya. Bukan saja permasalahan etis dalam praktik politik dinasti, namun juga putusan MK memberi peluang bagi politisi karbitan. Keputusan mengenai persyaratan usia calon Presiden/ Wakil Presiden adalah 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan

Perjalanan

PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api," katanya.

Krisbiantoro mengatakan, bagi pelanggan KA Argo Semeru dan Argo Wilis yang barangnya tertinggal atau hilang saat kejadian kereta anjlok, dapat mengambil barangnya secara langsung di Stasiun Wates dan Stasiun Gambir. Ada 26 nama pemilik barang dengan rincian 11 orang telah konfirmasi dan barangnya dikirim ke Stasiun Gambir kemarin siang pukul 13.00 WIB, satu orang barang dikirim ke Stasiun Yogyakarta, dan ada satu

Sumbangan hal 1

orang yang barangnya dikirim ke Purwokerto dengan KA Bogowonto. Selanjutnya, masih ada tujuh orang lagi yang barangnya belum terkonfirmasi yaitu masih di Stasiun Wates dan sisanya barang sudah diambil pemiliknya. "Pengambilan barang dapat dilakukan dengan menunjukkan identitas dan tiket baik fisik maupun digital di stasiun," katanya.

Krisbiantoro menjelaskan, dalam hal keterlambatan keberangkatan KA antarkota lebih dari satu jam, penumpang dapat membatalkan tiket dan mendapatkan pengembalian seluruh biaya tiket. (Ant/San)-f

Hari Ini,

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Ade Safri menjelaskan, materi surat lainnya yaitu mengenai pemberitahuan penanganan perkara yang terkait dengan pegawai KPK untuk kepentingan penyidikan. "Kemudian meminta Dewas KPK untuk mendorong pimpinan KPK RI menugaskan deputi koordinator koordinasi supervisi untuk melaksanakan supervisi penanganan perkara untuk bisa segera dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, Indonesia Police Watch

Sumbangan hal 1

(IPW) meminta KPK segera menyetujui permintaan supervisi yang dilayangkan Polda Metro Jaya untuk menuntaskan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap SYL. "IPW mendorong KPK untuk terlibat dalam supervisi sebagaimana diminta Polda Metro Jaya," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kamis (19/10).

Sugeng menilai dengan supervisi bisa menjelaskan bagaimana kronologi awal kasus tersebut. "Karena melalui supervisi KPK maka KPK dapat meminta kronologis penanganan perkara," ucapnya. (Ant/Has)-f

Robinson

penggantinya. Atau jika tidak mencukupi, dipidana penjara 5 tahun," tegas Ketua Majelis Hakim M Djauhar Setyadi SH MH di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Kamis (19/10).

Majelis hakim menyatakan, terdakwa Robinson terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor

31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas putusan itu, Robinson yang terlihat tenang selama persidangan menyatakan pikir-pikir setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya Imam Munandar SH MH dari Litigant & Co dalam waktu 7 hari. (Vin)-f

OPTIK MELAWAI

DAPATKAN VOUCHER UP TO 40% UNTUK FRAME+LENSA

DAPATKAN DISKON UP TO 20% UNTUK SUNGLASSES

Debit BRI KARTU KREDIT BRI

BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

opmel.link/vkr12201023

• Periode : 16 Okt - 2 Nov 2023
• Syarat & ketentuan berlaku

0212 117 2222 www.optikmelawai.com

Raden Arditya Mutwara L
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

BELUM lama ini, tepatnya tanggal 10 Oktober, dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Harapan yang muncul dengan adanya peringatan itu supaya orang-

Bunuh Diri dan Hari Kesehatan Mental Dunia

orang lebih sadar untuk lebih menyalahi diri sendiri. Tetapi kenyataan tidak selalu seindah harapan. Dua kasus bunuh diri menjadi awal atau pembuka di bulan Oktober 2023 ini. Kasus tersebut melibatkan dua mahasiswa Universitas terkemuka di Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah ditelisik lebih lanjut ternyata kasus bunuh diri di Indonesia tidak hanya itu saja, bahkan ada di angka yang cukup memprihatinkan.

Dari awal tahun 2023 hingga bulan Oktober saja sudah terjadi 971 kasus bunuh diri. Menurut katadata.co.id dari 971 kasus, kasus bunuh diri terbanyak dari Jawa Tengah. Belum dapat dipastikan penyebabnya banyaknya kasus, tetapi ini harus menjadi perhatian bersama. Terlepas dari masalah pribadi yang mendera, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk mencari akar permasalahan. Utamanya keluarga yang merupakan wujud terkecil dari masyarakat.

Kasus dua mahasiswa bunuh diri ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan karena menambah daftar panjang korban bunuh diri dari kalangan mahasiswa. Kasus bunuh diri dari kalangan akademik memiliki sebab yang cukup beragam, mulai dari tidak kunjung menyelesaikan studi atau tugas akhir, hingga tidak mampu membayar uang kuliah.

Kasus bunuh diri tertinggi setelah Jawa Tengah adalah Ibu Kota Jakarta. Penyebabnya berbeda, yakni lebih ke tekanan sosial dari Masyarakat akibat stigma hingga ke tekanan perekonomian. Data penulis dapat dari detik.com dan Tempo.co di sekitar pertengahan tahun 2021. Sampai saat ini memang kasus bunuh diri sebatas menjadi keprihatinan dan masuk ke ranah penegak hukum, yakni aparat kepolisian dan juga pengadilan tindak pidana. Pada akhirnya akar permasalahannya sering terlupakan.

Banyak kasus yang akhirnya tidak memiliki ujung yang jelas, karena selain alasan etika juga sebab lain yang masih samar. Pemerintahan dan seluruh lapisan Masyarakat memang harus bekerja sama untuk benar-benar fokus mengatasi masalah ini. Karena tidak menentu kemungkinan nantinya akan terjadi kasus serupa seperti memanjat tower untuk melakukan bunuh diri akibat permasalahan yang tak kunjung selesai.

Peran Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan sangat dihaapkan untuk menemukan akar dari masalah bunuh diri. Angka bunuh diri di Yogyakarta tepatnya di Gunung Kidul juga masih tinggi. Itupun sampai saat ini masih menjadi misteri. Sinergi antar pemerintah daerah dan spoke person di masing-masing kelurahan belum cukup untuk menguak alasan awal di balik peristiwa bunuh diri yang sering terjadi. Akhirnya semua dipandang hanya karena masalah finansial yang tidak terpenuhi. Jangan sampai ini seperti fenomena gunung es. Yang mana permasalahan inti justru tidak terbuka karena sulitnya mengakses informasi terkait penyebab kepada pihak keluarga. Ketika ini sampai ke ranah yang sudah tidak mampu dijangkau pemerintah, seperti keluarga, maka sebaiknya keluarga menjadi support system yang paling baik untuk mendukung Kesehatan mental masing-masing anggota keluarga. ***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park